

Daftar Pustaka

1. Buku

- Adjie, Habib. Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Anshori, Abdul Ghofur. Lembaga Kenotariatan Indonesia. Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Kie, Tan Thong. Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris. Jakarta: PT. Ichtar Baru Van Hoeve, 2011.
- Lubis, Irwansyah, Anhar Syahnel, and Muhammad Zuhdi Lubis. Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah: Panduan Praktis dan Mudah Taat Hukum. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018
- Lumban Tobing, G.H.S. Peraturan Jabatan Notaris. Jakarta: Erlangga, 1991.
- Masriani, Yulies Tiena. “Hukum Kenotariatan Indonesia Jilid 2.” In Habib Adjie, dkk., Hukum Kenotariatan Indonesia (Jilid 2), edited by Habib Adjie, et al. Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2022.
- Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia (Edisi ke-5, Cetakan ke-1). Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Mulyana, Deddy. Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Notodisoeryo, R. S., Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan, Jakarta: Rajawali, 1982.
- Ridwan, H. R. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Press, 2002.
- Salim, H. S., and Nurbani, E. S. Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Situmorang, Viktor M., and Cormentyna Sitanggang. Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press, 2012.
- Subekti, R., dan R. Tjitrosoedibio. Kamus Hukum. Jakarta: Pradnya

Paramita, 1986.

Sucoko, Badri Munir. Manajemen Administrasi Perkantoran Modern.
Jakarta: Erlangga, 2007.

Sugono, Dendy., Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa
Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

Sujamto. Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika,
1987.

Thamrin, Husni. Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris. Yogyakarta:
Laksbang Pressindo, 2011

Umar, Nassarudin, dan Nadhifah Attamimi. Pengantar Hukum
Administrasi Negara dan Mekanisme Pengawasan Notaris di
Indonesia. Ambon: LP2M IAIN Ambon, 2020.

Widiarty, Wiwik Sri. Buku Ajar Metode Penelitian Hukum. Yogyakarta:
Publika Global Media, 2024.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor: M-01.HT.03.01 Tahun 2003 Tentang Kenotarian

Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan
Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Serta
Anggaran Majelis Pengawas Notaris

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

3. Jurnal

Borman, Muhammad Syahrul. “Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat
Umum Dalam Perspektif Undang-undang Jabatan Notaris.” Jurnal
Hukum Dan Kenotariatan 3, no. 1 (Februari 2019): 78.
<http://repository.unitomo.ac.id/1606/>

Fatriansyah. "Peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris Dan Majelis
Kehormatan Notaris Terhadap Pembinaan Dan Pengawasan Notaris
Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan

Notaris." *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, no. 2 (Desember 2022): 291-298. doi:10.33087/legalitas.v14i2.370

Ibrahim, Johnny. "Doktrin Ultra Vires dan Konsekuensi Penerapannya terhadap Badan Hukum Privat." *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 2 (Mei 2011): 244. doi:10.20884/1.jdh.2011.11.2.184

Shabrina, Dina, Azmi Fendri, dan Frenadin Adegustara. "Peran Majelis Pengawas Daerah Notaris Dalam Mencegah Terjadinya Pelanggaran Hukum Oleh Notaris di Kota Padang." *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 11, no. 2 (Desember 2020): 221. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i2.4620>

Trisnomurti, Ria. "Tugas dan Fungsi Majelis Pengawas Daerah Dalam Menyelenggarakan Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penjatuhan Sanksi Terhadap Notaris." *Jurnal Notariil* 2, no. 2 (November 2017): 129. <https://doi.org/10.22225/jn.2.2.353.127-140>

4. Skripsi Dan Tesis

Efendi, R.P. "Keabsahan Penggunaan Buku Daftar Akta yang Belum Mendapatkan Pengesahan dari Majelis Pengawas Daerah (Studi Kasus Kabupaten Sleman)." *Tesis Magister*, Fakultas Hukum, Program Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2021.

Irianty, D.H. "Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pelaporan *Repertorium* kepada Majelis Pengawas Daerah Ikatan Notaris Indonesia di Kota Yogyakarta." *Skripsi Sarjana*, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bantul, 2017.

Malindo, Muhamad Nazzib Exsa. "Pelaksanaan Penyerahan Protokol Notaris yang Melebihi Usia 25 Tahun oleh Majelis Pengawas Notaris." *Skripsi*, Universitas Lampung, 2023.

Passamula, A. Baso. "Analisis Yuridis terhadap Pembuktian Akta di Bawah Tangan Kaitannya dengan Kewenangan Notaris." *Skripsi Sarjana*, Program Studi Ilmu Hukum, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada, 2021.

Santoso, R., "Peranan Majelis Pengawas Daerah Dalam Mengawasi Buku Daftar Akta (*Repertorium*) Notaris Di Kabupaten Sleman", *Tesis Magister*, Fakultas Hukum, Program Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2018.

Setiawati, W.O., "Peran Majelis Pengawas Daerah Notaris Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Notaris Yang Tidak Membuat

Buku Daftar Akta Atau *Repertorium*”, *Tesis Magister*, Fakultas Hukum, Program Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2021.

5. Internet

Tim Editorial Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa diakses pada 05 November 2024 Pukul 14.15
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengawasan>